



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
<b>x</b>	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

## Kejari Kantongi Nama Tsk DPPKAD Kota

**RBI, BENGKULU** - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, I Made Sudamawan SH, MH melalui Kasi Pidus Oktalian Darmawan SH mengatakan, penanganan perkara dugaan korupsi dana Beban Kerja (BK) pada DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2016 saat ini tim Penyidik sudah mengantongi nama-nama orang yang harus bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Namun untuk menyeret orang itu, pihaknya masih membutuhkan keterangan dari saksi ahli dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempertanyakan masalah Peraturan Wali Kota (Perwal) pengucuran dana BK tersebut.

"Sekarang ini kita masih menunggu hasil koordinasi kita dengan Kemendagri terkait dengan Perwal pembayaran dana BK ini," imbuhnya Selasa, (17/7).

Saat disinggung jumlah kerugian negara dalam perkara itu, Oktalian enggan menyebutkan berapa jumlah ril dan dan pasti kerugian negara hasil audit dari BPKP. Hanya saja ia memastikan, bahwa ada kerugian negara dalam perkara ini.

"Kita belum boleh ekspos kerugian negara ya, kita masih nunggu hasil koordinasi kita dengan Kemendagri. Kerugian negara akan disampaikan saat penetapan orang yang bertanggung jawab dalam perkara ini nantinya," pungkasnya. Untuk diekta-

hui, pembayaran tunjangan dana BK tahun 2015 diduga menyalahi aturan perwal nomor 36. Sesuai dengan perwal nomor 12 tahun 2014 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta, kemudian pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta, Jabatan sekretaris dan Kabid pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta, di tahun 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 5 juta. Jabatan bendahara ditahun 2014 menerima dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 menjadi Rp 4,5 juta.

Staf ASN tahun 2014 menerima dana BK Rp 1,5 juta, ditahun 2015 Rp 3,5 juta, dan honorer pada tahun 2014 menerima dana BK Rp 1 Juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 3 juta ditahun. Dana BK yang harus dikembalikan ASN dan honorer yang menerima dana BK itu adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pembayaran hanya berlangsung dua bulan, tetapi di dalam tanda-tangan penerimaan, ASN dan honorer tersebut harus tanda-tangan menerima tunjangan selama 7 bulan. Total semua anggaran Rp 1,8 Miliar Rp 200 Juta digunakan untuk membayar dana BK. Sesuai dengan penjelasan M Sofyan mantan kepala DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015. (ide)